BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata memiliki peran strategis sebagai salah satu sektor unggulan dalam pembangunan nasional karena mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian budaya lokal (Habibah, 2024). Keberadaannya juga memberikan efek berganda bagi sektor lain seperti transportasi, kuliner, dan industri kreatif, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan aktivitas wisata. Melalui pengangkatan potensi lokal yang unik dan autentik, pariwisata berperan penting dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan kearifan lokal kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan lokal menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Widiati & Permatasari, 2022).

Peningkatan peran strategis sektor pariwisata dalam pembangunan nasional juga tercermin dari pertumbuhan signifikan jumlah kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Dilansir dari laman kemenpar.go.id (2025), Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, melaporkan bahwa setiap tahun terjadi lonjakan jumlah kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara, dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara di Indonesia (2020-2024)

No.	Tahun	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Orang)
1	2024	1.021.084.031
2	2023	825.797.301
3	2022	734.864.693
4	2021	613.299.459
5	2020	524.571.392

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2025)

Dilansir dari laman kemenpar.go.id (2025), Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren pertumbuhan positif di sektor pariwisata. Sepanjang tahun 2024, total perjalanan wisatawan nusantara mencapai 1,021 miliar, naik 21,7% dari 825,79 juta di tahun sebelumnya. Di sisi lain, jumlah perjalanan wisatawan nusantara menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada 7 Februari 2025, tercatat sebanyak 13,9 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu, pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2024 mencapai 19,05% dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan kepercayaan yang semakin kuat terhadap pariwisata Indonesia. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional, berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Sektor pariwisata diproyeksikan menyumbang devisa sebesar 16,7 miliar dolar AS, meningkat 19,3% dibandingkan tahun 2023.

Sektor pariwisata di Indonesia mempunyai kontribusi yang penting dalam penerimaan devisa, pembentukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja (Aliansyah & Hermawan, 2019). Dilansir dari laman kemenpar.go.id (2025), kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) nasional pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 4,01–4,5%. Capaian ini menguatkan urgensi pengembangan pariwisata secara berkelanjutan yang berpihak pada potensi lokal dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menciptakan dampak jangka panjang yang merata.

Tren positif pertumbuhan pariwisata nasional yang telah dicapai pada 2024 menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah ke depan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sektor pariwisata diposisikan sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan. Pengembangan sektor ini diarahkan pada peningkatan kontribusi jasa, khususnya akomodasi serta makanan dan minuman, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8% pada tahun 2029. Di samping itu, penguatan infrastruktur serta kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif menjadi strategi utama untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas pariwisata yang bernilai tambah.

Namun, di tengah potensi yang besar tersebut, tantangan berupa rendahnya kualitas dan keberlanjutan pariwisata masih menjadi kendala, termasuk terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi wisata berkelanjutan (Kriswibowo, 2018). Untuk mengatasi tantangan tersebut sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan sektor pariwisata, diperlukan strategi pengembangan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam

pengelolaan destinasi wisata. Pelibatan aktif masyarakat lokal dinilai krusial untuk mendorong inklusi sosial serta pemerataan manfaat ekonomi dari aktivitas kepariwisataan (Wibowo & Belia, 2023). Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam konteks ini adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Menurut Demartoto dan Sugiarti (2009) yang dikutip oleh Syafiqah et al., (2022), *Community Based Tourism* (CBT) dapat dipahami sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata yang berasal dari, dikelola oleh, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat setempat. Model pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata. Melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, perekonomian lokal dapat mengalami peningkatan, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Konsep ini memiliki tujuan untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, kepuasan pengunjung, serta menekankan pelestarian warisan budaya, yang menjadi salah satu karakteristiknya melalui keterlibatan masyarakat (Prasiasa & Widari, 2022). Pendekatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat di tengah dinamika pembangunan nasional (Isa et al., 2024).

Pembangunan pariwisata di Indonesia diarahkan untuk tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana

pelestarian nilai budaya, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh (Simbolon et al., 2025). Dengan kata lain, pariwisata di Indonesia juga berupaya menjadi pariwisata berkelanjutan atau *Sustainable Tourism*. Pariwisata harus berkelanjutan karena mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal, serta memastikan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang (Saputra, 2024). Berdasarkan penelitian oleh Mauliyanti et al. (2024), *Community Based Tourism* dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang adil dan bertanggung jawab, diperlukan kerangka hukum yang mengatur tata kelola mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan potensi wisata, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang ini menjadi pedoman pengelolaan pariwisata yang berlandaskan pada prinsip manfaat, kekeluargaan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi, keberlanjutan, demokrasi, kesetaraan, dan kesatuan, dengan penekanan pada pemberian manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengembangan. Selain itu, pengembangan destinasi diarahkan untuk mengedepankan kearifan lokal, pelestarian warisan budaya, dan pemberdayaan sumber daya manusia,

sehingga regulasi ini memperkuat pembangunan pariwisata nasional yang menjadikan masyarakat sebagai subjek utama dan penerima manfaat langsung.

Community Based Tourism (CBT) memiliki relevansi yang kuat dengan kajian administrasi publik karena menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Manurung & Rahmayani, 2022). Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyusun regulasi, memberikan pendampingan, serta menyediakan fasilitas layanan publik yang mendukung pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Di Indonesia, konsep CBT telah diakomodasi dalam kebijakan nasional, seperti Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang menekankan keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi.

Hal ini ditegaskan kembali dalam Dokumen Rancangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia 2025–2029 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Widyasanti, 2024), yaitu melalui strategi pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan salah satu poin utamanya adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang secara eksplisit bertujuan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi. Strategi ini memperkuat posisi pariwisata sebagai sektor inklusif yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan secara terpadu.

Sejalan dengan strategi nasional yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif turut mendorong implementasi pendekatan pembangunan pariwisata yang berpihak pada komunitas lokal. Salah satu upaya yang diinisiasi adalah pengembangan desa wisata berbasis komunitas, yang dikenal sebagai *Community Based Tourism* (CBT), untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat (Syarifah & Rochani, 2021). Inisiatif ini juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025, yang mengarahkan pengembangan pariwisata agar mengoptimalkan potensi sumber daya lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam praktiknya, model pariwisata berbasis masyarakat ini sangat cocok diterapkan di wilayah pedesaan atau daerah yang memiliki kekayaan budaya dan lingkungan yang khas (Kusumah, 2023). Model ini umumnya berskala kecil dan menekankan interaksi langsung antara wisatawan dengan masyarakat setempat, dengan pengelolaan dan kepemilikan berada di tangan komunitas lokal. Tujuannya tidak semata untuk menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari pariwisata dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Pengembangan model ini umumnya melibatkan sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat yang bersama-sama menjaga keberlanjutan destinasi, sekaligus memperkuat desa wisata sebagai representasi identitas lokal

yang memiliki daya tarik pariwisata. Selaras dengan itu, data mengenai potensi desa wisata di Indonesia dapat dilihat, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Desa Wisata Tahun 2025

No.	Nama Provinsi	Jumlah Desa Wisata
1	Jawa Timur	614
2	Sumatera Barat	564
3	Sulawesi Selatan	537
4	Jawa Tengah	516
5	Jawa Barat	474
6	Sumatera Utara	334
7	Nusa Tenggara Barat	275
8	Sulawesi Tenggara	234
9	DI Yogyakarta	199
10	Bali	168

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2025)

Data dari laman Jejaring Desa Wisata (Jadesta) milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki oleh desa-desa wisata di Indonesia. Laman yang berfungsi sebagai layanan pengembangan serta pendataan profil dan klasifikasi desa wisata ini mencatat terdapat 6.106 desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah, dengan Provinsi Jawa Timur sebagai penyumbang terbanyak, yaitu 614 desa wisata.

Jawa Timur memiliki desa wisata terbanyak di Indonesia, mencerminkan kekayaan budaya yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Kota Kediri. Dalam hal ini mencerminkan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah Kota Kediri untuk mengatur dan mengelola Pembangunan sektor pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata dapat dipahami sebagai salah satu bentuk nyata dari implementasi otonomi daerah. Sebagai tindak lanjut di tingkat regional, Kota Kediri telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan (RIPK) Tahun 2025–2032. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa peraturan ini disusun sebagai pedoman bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memajukan sektor pariwisata di daerah.

Penyusunan RIPK ini mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang salah satunya menitikberatkan pada pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, peran komunitas menjadi aspek penting dalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata. Komunitas sendiri merupakan bagian dari praktik administrasi publik. Keban (2016), dalam bukunya *Dimensi Strategis Administrasi Publik*, mengemukakan bahwa administrasi publik mencakup enam dimensi utama, yaitu kebijakan, organisasi, manajemen, etika, akuntabilitas, dan lingkungan. Komunitas termasuk dalam dimensi organisasi karena berfungsi sebagai wadah kolektif masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial. Melalui peran komunitas tersebut, pemerintah dituntut untuk memberdayakan masyarakat lokal agar dapat terlibat aktif dalam pembangunan dan menciptakan tata kelola yang baik di sektor pariwisata.

Kota Kediri memiliki kekayaan budaya yang khas, salah satunya adalah kerajinan tenun ikat. Di Jawa Timur, terdapat dua sentra tenun ikat yang terkenal, yakni di Kota Kediri dan Kabupaten Lamongan. Di antara keduanya, Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul di Kota Kediri adalah sentra kerajinan tenun ikat yang lebih menonjol di Jawa Timur. Pada tahun 2021, Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul berhasil meraih Juara 1 dalam Kategori Daya Tarik Wisata

Budaya pada ajang East Java Tourism Award. Keistimewaannya semakin diakui ketika pada tahun 2022, Tenun Ikat Bandar Kidul ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini, menjadikan Tenun Ikat Bandar Kidul sebagai satu-satunya tenun ikat di Jawa Timur yang memperoleh pengakuan tersebut. Selain di Jawa Timur, tenun ikat yang juga diakui sebagai WBTB di Indonesia antara lain adalah Tenun Ikat Troso dari Jepara, Jawa Tengah, dan tenun ikat khas Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan laman Jejaring Desa Wisata (Jadesta) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul merupakan sentra kerajinan tradisional yang telah berdiri sejak tahun 1950. Kampung ini mengolah bahan mentah berupa benang menjadi kain sebagai produk setengah jadi, dan kini telah berkembang dengan melakukan diversifikasi produk menjadi barang jadi seperti sarung, baju, sepatu, syal, dompet, hingga topi. Keunikan Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul terletak pada proses produksinya yang masih menggunakan peralatan sederhana dan dikerjakan secara manual dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Keunikan inilah yang menjadi daya tarik utama kampung ini sebagai destinasi wisata edukasi. Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul menjadi satu-satunya kampung wisata edukasi yang ada di Kota Kediri yang masuk dalam 300 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2021.

Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul merupakan kawasan yang dihuni oleh para pengrajin tenun ikat asli Kota Kediri yang tergabung dalam satu wilayah.

Usaha tenun di kampung ini telah berlangsung secara turun-temurun hingga kini telah memasuki generasi keempat. Di Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul, terdapat 14 pengrajin tenun ikat yang sekaligus menjadi pemilik usaha, serta melibatkan sekitar 350 orang sebagai tenaga kerja yang berasal dari warga kampung tenun itu sendiri maupun maupun warga di sekitar kampung tersebut. Kampung ini mulai dikenal luas sebagai sentra kerajinan tenun ikat sejak tahun 2015. Kemudian, pada tahun 2019, Pemerintah Kota Kediri secara resmi menetapkannya sebagai Kampung Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul. Berdasarkan Keputusan Walikota Kediri Nomor 188.45/346/419.003/2021, Kampung Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul ditetapkan sebagai Kampung Keren (Kreatif dan Independen), yang merupakan bagian dari Prodamas Plus (Program Pemberdayaan Masyarakat).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2020, tujuan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus adalah untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan partisipatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Bantuan dari Prodamas yang diberikan kepada Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul berfungsi sebagai stimulus untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola pembangunan pariwisata berbasis potensi lokal. Menurut hasil observasi, bentuk bantuan tersebut antara lain berupa pembangunan gapura, pemasangan peta lokasi pengrajin tenun, dan papan nama rumah produksi sebagai dukungan dari aspek infrastruktur. Strategi ini merupakan

upaya Pemerintah Kota Kediri dalam mengangkat potensi budaya lokal menjadi destinasi wisata edukatif (Prasetya et al., 2024).

Selain adanya upaya dari Pemerintah Kota Kediri, pengembangan Kampung Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul juga melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai aktor utama, yakni sebuah komunitas yang beranggotakan masyarakat dan pelaku UMKM yang telah dibentuk sejak tahun 2020. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kediri Nomor 556/057/419.105/2020, Kelompok Sadar Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan Pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, implementasi peran tersebut tercermin dalam berbagai upaya pengembangan Kampung Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul, termasuk penguatan partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, pengembangan ekonomi, dan pengelolaan wisata. Upaya pengembangan Kampung Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul oleh Pokdarwis tidak hanya berfokus pada aspek internal, tetapi juga menjangkau eksternal, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif untuk memamerkan produk tenun dalam penyelenggaraan event lokal, yaitu Pasar Rakyat pada tahun 2019. Tidak berhenti di situ, Pokdarwis Tenun Ikat Bandar Kidul juga berpartisipasi dalam ajang perlombaan tingkat nasional. Atas kinerjanya, Pokdarwis berhasil meraih

penghargaan Silver Champion dalam Planet Tourism and Creative Campaign Award 2021. Menurut Ketua Pokdarwis, penilaian dalam ajang tersebut mencakup beberapa indikator, yakni aspek edukasi, pelayanan, dan sajian wisata (Nanang Masyhari, 2021).

beritajatim.com – “Dalam proposal kami telah dijelaskan secara rinci mengenai berbagai pengalaman yang akan diperoleh wisatawan saat berkunjung ke Bandar Kidul. Pengunjung akan disambut oleh warga setempat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat saat memasuki area. Selanjutnya, wisatawan dapat menikmati beragam kegiatan, mulai dari edukasi tentang proses menenun hingga berbagai hiburan menarik yang telah disiapkan,”

Sumber: (<https://beritajatim.com/pokdarwis-tenun-ikat-kota-kediri-raih-penghargaan-planet-tourism-indonesia-2021> diakses pada tanggal 6 Mei 2025).

Berdasarkan hasil observasi, stimulus berupa perbaikan infrastruktur melalui program Prodamas pada tahun 2021 dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul. Kemampuan kampung ini untuk terus berkembang, meskipun di tengah maraknya produksi tenun berbasis alat modern, tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Tabel 1. 3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul (2021-2024)

No.	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)
1.	2021	823
2.	2022	2.147
3.	2023	2.198
4.	2024	3.024

Sumber: Diolah oleh penulis (25 Mei 2025)

Pada tahun 2021, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 823 orang, kemudian meningkat menjadi 2.147 orang pada tahun 2022, 2.198 orang pada tahun 2023, dan mencapai 3.024 orang pada tahun 2024. Omzet yang diperoleh

juga terbilang stabil, dengan rata-rata antara Rp30 juta hingga Rp100 juta per bulan. Saat ini, Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul berhasil masuk dalam daftar 16 destinasi wisata unggulan Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2025–2032.

Penelitian ini berfokus pada penerapan *Community Based Tourism* dalam pengembangan Kampung Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul di Kota Kediri. Berdasarkan permasalahan dan penelitian terdahulu yang relevan, seperti yang dikemukakan oleh Hanifah et al. (2023), pelaku usaha di kampung tersebut kerap menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan baku kain tenun. Kesulitan ini disebabkan oleh tidak adanya lagi petani yang membudidayakan kapas maupun ulat sutra. Selain itu, keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dinilai belum memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Untuk memastikan keberlanjutan pengembangan Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul sebagai destinasi wisata unggulan, pengembangan difokuskan pada pariwisata berbasis masyarakat. Prinsip *Community Based Tourism* (CBT) yang dikemukakan oleh Harold Goodwin dan Santilli (2009), yang menekankan bahwa pengembangan wisata berbasis masyarakat memerlukan *Social Capital and Empowerment: Participation, Local Economic Development, Commercial Viability: Sustainability, dan Collective Benefits: Capacity Building*. Dengan penerapan prinsip *Community Based Tourism*, pengembangan wisata di

Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Keberlanjutan Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul sebagai destinasi wisata unggulan, meskipun program pendukung sebelumnya seperti Kampung Keren tidak lagi dilanjutkan, menunjukkan bahwa pendekatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) efektif dalam menjaga keberlanjutan kegiatan wisata dan mendukung ekonomi lokal. Dengan mempertimbangkan pentingnya pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Penerapan *Community Based Tourism* Dalam Pengembangan Kampung Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan permasalahannya adalah “Bagaimana penerapan *Community Based Tourism* dalam pengembangan Kampung Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Community Based Tourism* dalam pengembangan Kampung Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul, Kota Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian teoritis mengenai penerapan *Community Based Tourism*, khususnya dalam konteks pengembangan wisata berbasis partisipasi masyarakat.
- b. Memberikan pemahaman secara konseptual mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan serta tantangan dalam penerapan *Community Based Tourism* pada pengembangan kampung wisata.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, Dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, khususnya terkait dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat lokal.

- b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat menambah keilmuan di bidang administrasi publik, khususnya mengenai penerapan *Community Based Tourism* dalam pengembangan wisata. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir yang relevan.

c. Bagi Masyarakat Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan tantangan dalam pengembangan kampung wisata berbasis komunitas, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengelolaan wisata yang berkelanjutan.